



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

CAPAIAN INVESTASI 2023 DAN TANTANGAN 2024

Dian Cahyaningrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kinerja investasi di tahun 2023 menggembirakan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, realisasi investasi pada tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, melebihi target investasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun. Realisasi investasi tahun 2023 tumbuh 17,5% secara tahunan dan 101,3% dari target investasi tahun 2023. Capaian investasi tahun 2023 juga melebihi 129% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp1099 triliun.

Secara rinci, realisasi investasi tahun 2023 terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6% dari total investasi tahun 2023. Realisasi PMDN tumbuh 22,1% dibandingkan tahun 2022. Sementara realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp744 triliun atau 52,4% dari total investasi tahun 2023. Nilai PMA tumbuh 13,7% dibandingkan tahun 2022.

Dari realisasi investasi sepanjang 2023, penyerapan tenaga kerja mencapai 1.823.543 pekerja. Angka tersebut naik 20% dari capaian tahun 2022, yakni 1.500.000 pekerja. Namun, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui besarnya investasi yang masuk pada tahun 2023 belum sebanding dengan serapan tenaga kerjanya.

Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah menargetkan investasi senilai Rp1.650 triliun, naik 17,85% dibandingkan dengan target 2023. Dari jumlah tersebut, setidaknya 50% disumbang oleh investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI). Adapun kebutuhan investasi pada agenda strategis nasional pada tahun 2024 adalah Rp77,5 triliun untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Rp97 triliun untuk pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Nilai tersebut belum termasuk megaprojek nasional Ibukota Negara (IKN) Nusantara yang mencapai Rp466 triliun, serta proyek strategis nasional (PSN).

Target investasi tahun 2024 juga diharapkan tercapai dengan baik, meskipun tidak mudah seiring dengan adanya tantangan investasi baik dari eksternal maupun internal. Secara eksternal, ketegangan geopolitik yang tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan moneter, hingga kontraksi pertumbuhan ekonomi di negara maju menjadi hambatan bagi pertumbuhan FDI. Akibatnya aliran FDI ke Asia Tenggara menurun, termasuk ke Indonesia. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam Investment Trend Monitor January 2024, mencatat FDI ke Asia Tenggara pada 2023 turun drastis hingga 16% menjadi US\$192 miliar. Realisasi tersebut merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Penurunan FDI dipicu oleh terpengkasnya aliran modal asing ke negara-negara yang selama ini menjadi pusat investasi dunia, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

Sementara faktor internal yang menjadi tantangan investasi di tahun 2024 antara lain penyelenggaraan pemilu. Secara historis, pertumbuhan ekonomi pada tahun digelarnya pemilu selalu turun yang dipicu perlambatan investasi dan menjadi pendorong utama produk domestik bruto (PDB). Faktor lainnya adalah kemudahan perizinan, sinkronisasi regulasi, pengadaan lahan, hingga ketenagakerjaan. Meskipun telah dibentuk UU No. 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, faktanya aspek ketenagakerjaan masih dikeluhkan dunia usaha. Sistem perizinan Online Single Submission (OSS) juga sering mendapat kritik karena banyak program yang belum terintegrasi. Begitu pula regulasi di level pusat dan daerah, belum sepenuhnya sinkron.

Terkait tantangan investasi 2024, pemerintah menyusun skala prioritas, dengan berfokus pada sektor yang benar-benar prospektif mengundang investor, yakni infrastruktur, jasa, dan penghiliran sumber daya alam. Dengan diimplementasikannya konsensus pajak minimal global di tahun 2024, pemerintah juga tetap memberikan insentif untuk investasi sebagai daya tarik bagi investor.

Sebagai upaya meningkatkan investasi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, menyarankan pemerintah memacu reformasi kebijakan struktural terhadap iklim usaha dan investasi secara konsisten untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan daya saing investasi. Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas ekonomi makro, di samping sosial politik di tengah masa transisi kepemimpinan. Sementara Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chandra Wahjudi menyarankan perlu ada regulasi yang efisien dan kepastian hukum yang konsisten bagi investasi yang masuk. Tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah perlu dihindari sehingga birokrasi menjadi lebih efisien.

Atensi DPR

Investasi bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja. Sayangnya besarnya investasi yang masuk pada tahun 2023 belum sebanding dengan serapan tenaga kerjanya. Realisasi investasi 2024 juga perlu diwaspadai seiring dengan adanya tantangan investasi, baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal tersebut adalah ketegangan geopolitik yang tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan moneter, dan kontraksi pertumbuhan ekonomi di negara maju yang menjadi hambatan pertumbuhan FDI. Sedangkan tantangan internal investasi 2024 adalah persoalan kemudahan perizinan, sinkronisasi regulasi, pengadaan lahan, dan ketenagakerjaan. Sehubungan dengan persoalan tersebut, penting bagi Komisi VI DPR RI selalu mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai tantangan investasi 2024 dan melakukan berbagai upaya untuk menghadapinya agar target investasi tahun 2024 tercapai. Upaya tersebut antara lain memastikan pemilu berjalan dengan aman dan memperbaiki ekosistem investasi. Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang sebanding dengan besarnya investasi agar investasi dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Sumber

Bisnis Indonesia, 23 dan 25 Januari 2024;
Rakyat Merdeka, 25 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 pusaka.dpr.go.id

 [@pusaka_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.